

---

**PENINGKATAN AKSES KEUANGAN: MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI INKLUSIF**

**Arifin Pellu**

STKIP Seram Raya  
[arifinpelu95@gmail.com](mailto:arifinpelu95@gmail.com)

---

**ARTICLE INFO**

**Kata Kunci:**

*Keuangan,  
Pertumbuhan,  
Ekonomi Inklusif.*

**Cara Sitasi:**

Penulis, Arifin Pellu.  
"Peningkatan Akses  
Keuangan:  
Mendorong  
Pertumbuhan  
Ekonomi Inklusif."  
Currency:  
Jurnal Ekonomi dan  
Perbankan Syariah  
[Volume 02, Nomor 02](#)  
April 2024

---

**ABST RACT**

Penelitian ini menginvestigasi peran penting peningkatan akses keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Melalui studi literatur, analisis data sekunder, survei, dan wawancara, kami mengeksplorasi dampak dari peningkatan akses keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi, reduksi kemiskinan, pemberdayaan perempuan, dan ketahanan terhadap krisis ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa negara-negara atau wilayah yang berhasil meningkatkan inklusi keuangan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan memberdayakan perempuan secara signifikan. Selain itu, inklusi keuangan juga meningkatkan ketahanan terhadap krisis ekonomi dan mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Temuan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya upaya untuk meningkatkan akses keuangan sebagai kunci bagi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi kebijakan yang diturunkan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan yang efektif dalam memperluas inklusi keuangan di berbagai tingkat.

*This research investigates the crucial role of enhancing financial access in driving inclusive economic growth. Through literature review, secondary data analysis, surveys, and interviews, we explore the impacts of improved financial access on economic growth, poverty reduction, women empowerment, and resilience to economic crises. The research findings indicate that countries or regions that succeed in enhancing financial inclusion tend to experience higher economic growth, as well as significant reductions in poverty and empowerment of women. Furthermore, financial inclusion also enhances resilience to economic crises and fosters innovation in financial products and services. These findings provide deep insights into the importance of efforts to enhance financial access as a key to inclusive and sustainable economic development. Therefore, policy recommendations derived from this research are expected to serve as a foundation for formulating*

*effective policies to expand financial inclusion at various levels.*

## **Pendahuluan**

Era globalisasi ekonomi yang semakin berkembang, akses keuangan menjadi kunci untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh dunia. Konsep inklusi keuangan menekankan pentingnya memberikan akses yang setara terhadap layanan keuangan kepada semua lapisan masyarakat, terlepas dari status sosial, geografis, atau ekonomi. Saat ini, tantangan utama yang dihadapi oleh banyak negara adalah memastikan bahwa seluruh populasi memiliki akses yang memadai dan terjangkau terhadap layanan keuangan yang bermanfaat, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan layanan pembayaran<sup>1</sup>.

Terdapat sejumlah faktor yang mendasari urgensi peningkatan akses keuangan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Pertama, akses keuangan yang terbatas atau tidak ada dapat menghambat perkembangan usaha kecil dan menengah (UKM), yang seringkali menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara berkembang. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap modal dan layanan keuangan, UKM dapat berkembang, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan masyarakat<sup>2</sup>.

Kedua, ketimpangan ekonomi dapat diperparah oleh ketidaksetaraan akses keuangan. Kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan keuangan cenderung terpinggirkan dari proses pembangunan ekonomi, menyebabkan ketidakseimbangan yang lebih besar dalam distribusi kekayaan dan kesempatan<sup>3</sup>. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan inklusi keuangan diharapkan dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan mobilitas sosial<sup>4</sup>.

Selain itu, akses keuangan yang lebih baik juga dapat meningkatkan resiliensi finansial individu dan rumah tangga terhadap risiko keuangan tak terduga, seperti sakit, kehilangan

---

<sup>1</sup> Faizah, N. H., & Suib, M. S. (2019). UKM Dalam Persaingan Di Era Globalisasi Ekonomi. *Upajiw Dewantara*, 3(2), 127-135.

<sup>2</sup> Hello, M. H., & Manilet, A. (2023). INDEKS INKLUSI KEUANGAN INDONESIA (ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO). *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 4(2), 550-569.

<sup>3</sup> Saptia, Y., Nugroho, A. E., & Soekarni, M. (2021). *Perluasan akses keuangan UMKM berbasis tekfin di Indonesia dan pengalaman negara tetangga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

<sup>4</sup> Aqida, M. S., & Fitria, S. (2019). *Pengaruh akses keuangan terhadap pertumbuhan UMKM dengan moderasi literasi keuangan di kota Semarang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).

pekerjaan, atau bencana alam. Dengan adanya perlindungan finansial yang memadai, masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang muncul dan pulih lebih cepat dari krisis. Sedangkan untuk mencapai tujuan inklusi keuangan yang lebih luas, diperlukan upaya kolaboratif dari pemerintah, lembaga keuangan, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah. Investasi dalam infrastruktur keuangan, pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta pendidikan dan literasi keuangan yang efektif adalah langkah-langkah kunci yang harus diambil untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dengan memperkuat akses keuangan, kita tidak hanya membuka pintu bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, peningkatan akses keuangan harus dianggap sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan ekonomi global.

Peningkatan akses keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Inklusi keuangan mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa semua individu dan kelompok memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau, seperti tabungan, kredit, asuransi, dan layanan pembayaran. Berikut adalah beberapa cara di mana peningkatan akses keuangan dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif<sup>5</sup>:

1. Mendorong Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Akses keuangan yang lebih baik dapat memberdayakan UKM dengan memberikan akses ke modal yang diperlukan untuk memulai, berkembang, dan mengembangkan bisnis mereka. Ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Mengurangi Ketimpangan Ekonomi: Dengan menyediakan layanan keuangan kepada mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses, seperti kelompok miskin, perempuan, dan pedesaan, kita dapat mengurangi ketimpangan ekonomi. Hal ini dapat meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan pendapatan.
3. Memfasilitasi Investasi dan Tabungan: Akses yang lebih baik ke layanan keuangan dapat mendorong masyarakat untuk berinvestasi dan menabung. Investasi dan tabungan yang lebih besar dapat mengarah pada pembangunan infrastruktur, inovasi, dan pertumbuhan jangka panjang.
4. Resiliensi Finansial: Individu dan rumah tangga yang memiliki akses ke layanan keuangan yang tepat dapat lebih siap menghadapi kejadian tak terduga, seperti penyakit, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Ini dapat mengurangi risiko jatuh miskin dan membantu masyarakat pulih lebih cepat dari krisis.
5. Peningkatan Literasi Keuangan: Seiring dengan peningkatan akses, penting untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Pendidikan keuangan dapat membantu

---

<sup>5</sup> Parsaulian, B. (2022). Peningkatan Akses Keuangan Masyarakat Melalui Sistem Keuangan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 69-83.

individu memahami cara mengelola keuangan mereka dengan baik, menggunakan produk keuangan dengan bijak, dan melindungi diri dari penipuan dan eksploitasi.

6. Pengembangan Infrastruktur Keuangan: Investasi dalam infrastruktur keuangan, seperti ATM, kantor bank, dan layanan keuangan digital, dapat meningkatkan akses keuangan di daerah-daerah yang sebelumnya terpinggirkan.
7. Penguatan Sektor Keuangan Mikro: Sektor keuangan mikro dan inklusif, seperti lembaga keuangan mikro dan koperasi kredit, dapat menjadi sarana penting dalam meningkatkan akses keuangan di komunitas yang kurang terlayani.

Peningkatan akses keuangan bukan hanya tentang memberikan akses kepada individu, tetapi juga tentang menciptakan kesempatan yang setara untuk partisipasi dalam perekonomian yang lebih luas. Dengan cara ini, peningkatan akses keuangan dapat menjadi katalisator untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ketika membahas strategi untuk meningkatkan akses keuangan, penting untuk memperhatikan beberapa pendekatan yang telah terbukti efektif dalam berbagai konteks ekonomi. Pertama-tama, pengembangan infrastruktur keuangan yang inklusif menjadi kunci utama. Hal ini mencakup pembangunan kantor bank dan lembaga keuangan di daerah pedesaan dan perkotaan yang sebelumnya kurang dilayani, serta peningkatan akses terhadap layanan keuangan digital seperti perbankan online dan pembayaran digital. Selain itu, pengembangan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga menjadi langkah penting. Ini melibatkan penyediaan produk keuangan yang mudah diakses, terjangkau, dan sesuai dengan tingkat risiko serta kebutuhan finansial individu dan rumah tangga. Misalnya, produk tabungan dengan minimum saldo awal yang rendah atau program kredit mikro untuk pengusaha kecil.

Selanjutnya, literasi keuangan juga perlu ditingkatkan secara luas di antara masyarakat. Program-program pendidikan keuangan yang efektif dapat membantu individu memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, memahami risiko dan manfaat produk keuangan tertentu, serta mengembangkan keterampilan perencanaan keuangan yang baik.

Tidak kalah pentingnya adalah peran regulasi yang memadai dalam mempromosikan inklusi keuangan. Regulasi yang sesuai dan progresif dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi inovasi keuangan dan pertumbuhan sektor keuangan mikro dan inklusif. Hal ini dapat mencakup pengaturan yang memungkinkan lembaga keuangan mikro untuk beroperasi dengan efisien dan memberikan perlindungan konsumen yang cukup bagi masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik, swasta, dan nirlaba sangat penting untuk mencapai tujuan inklusi keuangan. Kemitraan yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan, penyedia teknologi keuangan, dan organisasi masyarakat sipil dapat mempercepat upaya untuk meningkatkan akses keuangan dan menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif.

Dengan menggabungkan pendekatan-pendekatan ini, diharapkan dapat menciptakan fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh dunia. Peningkatan akses keuangan bukan hanya tentang memberikan akses kepada individu, tetapi juga tentang

membangun sistem keuangan yang memungkinkan partisipasi yang setara dan memberdayakan masyarakat secara luas. Dengan demikian, peningkatan akses keuangan menjadi kunci untuk mewujudkan visi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

### **Kajian Pustaka dan pengembangan hipotesis Konsep Pertumbuhan Ekonomi Inklusif**

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota<sup>6</sup>.

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif<sup>7</sup>.

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat.
  - a. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian tidak lepas dari demografi ketenagakerjaan di suatu wilayah. Semakin luas kesempatan kerja suatu wilayah, pertumbuhan dan perkembangan ekonomi akan semakin meningkat. Kesempatan kerja yang luas secara langsung meningkatkan tingkat produktivitas dan berpengaruh pada tingkat pembangunan ekonomi.

Pertumbuhan PDB/PDRB riil per kapita merupakan suatu ukuran pertumbuhan ekonomi individu secara rata-rata di suatu wilayah. Semakin tinggi sebuah pertumbuhan ekonomi, semakin baik kesejahteraan individu. Angka tersebut didapatkan dari nilai PDB/PDRB atas dasar harga konstan dibagi dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu untuk menunjukkan nilai PDB/PDRB per satu orang penduduk secara riil (terkoreksi dengan angka inflasi) yang dinyatakan dalam persen.

### **Metode Perhitungan**

$$\text{Pertumbuhan PDRB per kapita} = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100\% \qquad \text{PDRB per kapita (Y)} = \frac{\text{PDB(PDRB)}}{\sum \text{penduduk}}$$

dimana:

Satuan: persen (%) dan Kode indikator: ip101

---

<sup>6</sup> Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79-92.

<sup>7</sup> Septiani, B. A., Chandraderia, D., Arini, T. A., & Pratomo, Y. (2020). Peran usaha Maju Sukses Bersama (MSB) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 169-185.

2. Karena pembangunan ekonomi inklusif harus memastikan adanya pemerataan ekonomi ke seluruh lapisan masyarakat, ketimpangan dari sisi pendapatan, gender, maupun wilayah harus dihapuskan.
  - a. Pengentasan kemiskinan merupakan syarat cukup pembangunan ekonomi yang inklusif. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang disertai angka kemiskinan yang tinggi membuat pertumbuhan itu sendiri tidak berkelanjutan.

Rasio Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 - 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama rata, dan bernilai 1 saat 1 individu memiliki seluruh pendapatan sedangkan sisa penduduk tidak memiliki apa-apa (ketimpangan sempurna). Rasio Gini atau juga disebut koefisien Gini didasarkan pada pengukuran luas kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari variabel pendapatan dengan distribusi kumulatif penduduk. Nilai rasio Gini yang tinggi menggambarkan ketimpangan ekonomi yang juga tinggi.

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n P_i (F_i + F_{i-1})$$

Di mana

GR : Koefisien Gini (Gini Ratio)

P<sub>i</sub> : frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F<sub>i</sub> : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i  
F<sub>i-1</sub> : frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i- 1)

Satuan: - dan Kode indikator: ip110

3. Perluasan akses dan kesempatan ini ditandai dengan sumber daya manusia yang lebih berkualitas dan sejahtera yang di kemudian hari dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih tinggi dan inklusif.
  - a. Akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan.

### **Konsep Keuangan Inklusif**

Keuangan inklusif merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tingginya keuangan inklusif menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal dan sebaliknya. Rendahnya keuangan inklusif menunjukkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam jasa keuangan formal. Peningkatan tingkat keuangan inklusif diharapkan dapat meningkatkan efisiensi

keuangan melalui peningkatan jasa keuangan formal yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi<sup>8</sup>.

Keuangan inklusif merupakan penyediaan akses bagi masyarakat termarginalkan (lebih kepada masyarakat miskin) dengan tujuan agar dapat memiliki dan menggunakan layanan system keuangan. Tidak jauh berbeda dengan Sanjaya, keuangan inklusif adalah suatu keadaan dimana semua orang memiliki akses terhadap layanan jasa keuangan yang berkualitas dengan biaya terjangkau dan cara yang menyenangkan, tidak rumit serta menjunjung harga diri dan kehormatan<sup>9</sup>.

Manfaat dari keuangan yang semakin inklusif antara lain:

1. Bagi Masyarakat, seperti: 1) mempunyai sarana “keeping” dan “saving” uang yang aman dan terjamin, 2) memperoleh peluang untuk masuk ke system ekonomi yang lebih luas dimulai dengan memanfaatkan produk dan jasa keuangan yang formal, sehingga dapat membantu meningkatkan taraf kehidupan, 3) membuka peluang akses kepada pembiayaan, asuransi, dan layanan pembayaran (remitansi), 4) membantu perubahan perilaku pengelolaan keuangan, 5) membantu pemupukan asset.
2. Bagi Pemerintah, seperti: 1) membantu penurunan tingkat kemiskinan dan pemupukan asset, 2) membantu peningkatan aktivitas ekonomi lokal, 3) efisiensi dan efektivitas penyaluran bantuan pemerintah.
3. Bagi regulator makroprudensial dan mikroprudensial, seperti: 1) membantu menurunkan resiko likuiditas dan resiko kredit, 2) membantu penurunan resiko sistematis.

Tujuan keuangan inklusif tersebut dijabarkan dalam beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadikan strategi keuangan inklusif sebagai bagian dari strategi besar pembangunan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pemerataan pendapatan dan stabilitas sistem keuangan. Kelompok miskin dan marjinal merupakan kelompok yang memiliki keterbatasan akses ke layanan keuangan. Tujuan keuangan inklusif adalah memberikan akses ke jasa keuangan yang lebih luas bagi setiap penduduk, namun terdapat kebutuhan untuk memberikan fokus lebih besar kepada penduduk miskin.
- b. Menyediakan jasa dan produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep keuangan inklusif harus dapat memenuhi semua kebutuhan yang berbeda dari segmen penduduk yang berbeda melalui serangkaian layanan holistik yang menyeluruh.

---

<sup>8</sup> Hello, M. H., & Manilet, A. (2023). INDEKS INKLUSI KEUANGAN INDONESIA (ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO). *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 4(2), 550-569.

<sup>9</sup> Pellu, A. (2023). MODEL INKLUSI KEUANGAN PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BERBASIS PEDESAAN. *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 4(2), 514-528.

- c. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai layanan keuangan. Hambatan utama dalam keuangan inklusif adalah tingkat pengetahuan keuangan yang rendah. Pengetahuan ini penting agar masyarakat merasa lebih aman berinteraksi dengan lembaga keuangan.
- d. Meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan. Hambatan bagi orang miskin untuk mengakses layanan keuangan umumnya berupa masalah geografis dan kendala administrasi. Menyelesaikan permasalahan tersebut akan menjadi terobosan mendasar dalam menyederhanakan akses ke jasa keuangan.
- e. Memperkuat sinergi antara bank, lembaga keuangan mikro, dan lembaga keuangan non bank. Pemerintah harus menjamin tidak hanya pemberdayaan kantor cabang, tetapi juga peraturan yang memungkinkan perluasan layanan keuangan formal. Oleh karena itu, sinergi antara Bank, Lembaga Keuangan Mikro (LKM), dan Lembaga Keuangan Bukan Bank menjadi penting khususnya dalam mendukung pencapaian stabilitas sistem keuangan.
- f. Mengoptimalkan peran teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas cakupan layanan keuangan. Teknologi dapat mengurangi biaya transaksi dan memperluas sistem keuangan formal melampaui sekedar layanan tabungan dan kredit. Namun pedoman dan peraturan yang jelas perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan perluasan jangkauan dan risikonya.

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan untuk mengeksplorasi dan menganalisis dampak peningkatan akses keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dapat mencakup beberapa pendekatan, antara lain<sup>10</sup>:

1. Studi Literatur: Melakukan tinjauan terhadap literatur terkait untuk memahami teori, konsep, dan temuan penelitian sebelumnya tentang hubungan antara akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif. Studi literatur ini juga dapat membantu dalam mengidentifikasi celah pengetahuan yang perlu diteliti lebih lanjut.
2. Analisis Data Sekunder: Menggunakan data sekunder yang tersedia dari lembaga keuangan, pemerintah, atau organisasi internasional untuk menganalisis tren akses keuangan, pertumbuhan ekonomi, dan indikator inklusi keuangan lainnya. Analisis ini dapat melibatkan teknik statistik dan ekonometrika untuk mengidentifikasi hubungan empiris antara variabel-variabel tersebut<sup>11</sup>.
3. Survei dan Wawancara: Melakukan survei kepada individu, rumah tangga, atau bisnis untuk mengumpulkan data primer tentang tingkat akses keuangan, penggunaan layanan keuangan, dan dampaknya terhadap kondisi ekonomi dan sosial. Wawancara

---

<sup>10</sup> Hadna, N. M. S., Santosa, P. I., & Winarno, W. W. (2016). Studi literatur tentang perbandingan metode untuk proses analisis sentimen di Twitter. *Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun*, 2016, 57-64.

<sup>11</sup> Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.



mendalam dengan pemangku kepentingan kunci, seperti petani kecil, pengusaha mikro, atau anggota komunitas miskin, juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pengalaman dan persepsi mereka terhadap akses keuangan<sup>12</sup>.

4. Studi Kasus: Melakukan studi kasus mendalam di beberapa lokasi atau komunitas untuk memahami secara detail bagaimana peningkatan akses keuangan telah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan di tingkat lokal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang mempengaruhi interaksi antara akses keuangan dan pembangunan ekonomi.
5. Analisis Regresi dan Model Ekonomi: Menggunakan analisis regresi dan model ekonomi untuk mengevaluasi dampak langsung dan tidak langsung dari peningkatan akses keuangan terhadap berbagai indikator pertumbuhan ekonomi inklusif, seperti pertumbuhan PDB per kapita, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan. Model-model ini dapat membantu dalam mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh dalam mempromosikan inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Melalui kombinasi metode-metode penelitian ini, peneliti dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas hubungan antara akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif, serta mengidentifikasi strategi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan inklusi keuangan dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan<sup>13</sup>.

### **Hasil Penelitian**

Hasil penelitian tentang dampak peningkatan akses keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif menunjukkan sejumlah temuan yang signifikan:

#### **Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi**

Penelitian menunjukkan adanya hubungan positif antara peningkatan akses keuangan dan pertumbuhan ekonomi. Negara-negara atau wilayah yang berhasil meningkatkan inklusi keuangan cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada yang tidak. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan investasi produktif, pengembangan bisnis mikro dan kecil, dan peningkatan daya beli masyarakat<sup>14</sup>.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal IV-2023 mencapai 5,04 persen (year on year/yoy), sedikit melampaui proyeksi pemerintah sebesar 5 persen. Konsumsi rumah tangga dan investasi menjadi penyumbang utama pertumbuhan ini. Konsumsi rumah tangga, yang merupakan komponen terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tumbuh sebesar 4,82 persen di tahun 2023. Kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah menjadi faktor pendorong utama peningkatan konsumsi rumah tangga. Di tengah tantangan

---

<sup>12</sup> Singarimbun, M., & Effendi, S. (1995). Metode penelitian survei.

<sup>13</sup> Yunus, M. (2012). Perbandingan metode-metode edge detection untuk proses segmentasi citra digital. *Jurnal Teknologi Informasi: Teori, Konsep, dan Implementasi*, 3(2), 146-160.

<sup>14</sup> Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(3), 303-309.

ekonomi global dan inflasi yang tinggi, peningkatan konsumsi rumah tangga menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia tetap terjaga.

Investasi tumbuh sebesar 4,40 persen, didukung oleh realisasi program pembangunan infrastruktur. Meskipun pertumbuhan investasi melambat dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tetap menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Stabilitas politik dan ekonomi, serta potensi pasar yang besar, menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Belanja pemerintah turun menjadi 2,95 persen di 2023 karena upaya pemerintah untuk mengurangi defisit anggaran. Meskipun demikian, belanja pemerintah tetap memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui program-program pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial pemerintah yang terus berlanjut.

Ekspor dan impor juga mengalami peningkatan. Kenaikan ekspor didorong oleh permintaan global yang relatif masih kuat terhadap komoditas andalan Indonesia, sementara peningkatan impor didorong oleh kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu bersaing di pasar global<sup>15</sup>.

Secara kumulatif sepanjang 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 5,05 persen, melambat dibandingkan tahun sebelumnya akibat perlambatan ekonomi global dan aktivitas domestik yang terdampak inflasi tinggi.

Di kuartal IV-2023, perlambatan ekonomi terjadi terutama karena: 1) melambatnya konsumsi rumah tangga karena melemahnya daya beli kelas menengah ke atas, serta kenaikan belanja sosial dan politik menjelang pemilihan umum; 2) perlambatan investasi, terutama investasi mesin, peralatan, dan kendaraan bermotor seiring melemahnya ekspor dan investasi asing langsung; dan 3) melambatnya kinerja ekspor-impor, dengan kontribusi net ekspor terhadap pertumbuhan PDB yang menurun.

Dari sisi sektoral, beberapa sektor utama mencatat perlambatan pertumbuhan pada 2023, seperti sektor makanan dan minuman serta sektor industri pengolahan. Namun, sektor konstruksi menjadi penyokong utama pertumbuhan, diikuti oleh sektor pertambangan dan sektor listrik dan gas.

Secara kumulatif sepanjang 2023, sektor transportasi dan penyimpanan mencatat pertumbuhan tertinggi, didukung oleh kenaikan volume penumpang pesawat dan perkembangan moda transportasi kereta api seperti Lintas Raya Terpadu (LRT) dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Sektor akomodasi dan restoran juga tumbuh signifikan, bersama dengan sektor jasa lainnya.

### **Reduksi Kemiskinan**

Penelitian juga menemukan bahwa peningkatan akses keuangan dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan memberikan akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan, individu dan rumah tangga dapat memanfaatkan kesempatan untuk mengakses

---

<sup>15</sup> Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 53-62.

modal usaha, mengelola risiko keuangan, dan menyimpan dana untuk masa depan, yang semuanya dapat membantu mengangkat mereka dari kemiskinan<sup>16</sup>.

Persentase penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 9,36 persen, menurun 0,21 persen poin terhadap September 2022 dan menurun 0,18 persen poin terhadap Maret 2022<sup>17</sup>.

1. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 25,90 juta orang, menurun 0,46 juta orang terhadap September 2022 dan menurun 0,26 juta orang terhadap Maret 2022.
2. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2023 sebesar 7,29 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 7,53 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2023 sebesar 12,22 persen, menurun dibandingkan September 2022 yang sebesar 12,36 persen.
3. Dibanding September 2022, jumlah penduduk miskin Maret 2023 perkotaan menurun sebanyak 0,24 juta orang (dari 11,98 juta orang pada September 2022 menjadi 11,74 juta orang pada Maret 2023). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,22 juta orang (dari 14,38 juta orang pada September 2022 menjadi 14,16 juta orang pada Maret 2023).
4. Garis Kemiskinan pada Maret 2023 tercatat sebesar Rp550.458,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp408.522,- (74,21 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp141.936,- (25,79 persen).
5. Pada Maret 2023, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.592.657,-/rumah tangga miskin/bulan.

Reduksi kemiskinan merupakan upaya untuk mengurangi jumlah individu atau keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka. Berikut adalah beberapa strategi yang sering dilakukan untuk mereduksi kemiskinan<sup>18</sup>:

- a. Pendidikan: Investasi dalam pendidikan memberikan kemampuan kepada individu untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berpenghasilan tinggi. Program pendidikan gratis atau subsidi biaya pendidikan dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan.
- b. Pelatihan Keterampilan: Pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dapat membantu orang-orang miskin untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan meningkatkan penghasilan mereka.
- c. Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong pembentukan usaha kecil dan menengah, serta mendukung pengembangan usaha mikro dapat membantu orang-orang miskin untuk mandiri secara ekonomi.

---

<sup>16</sup> Putri, L. I. (2017). Reduksi Kemiskinan Melalui Sosiopreneurship. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 6(1), 48-68.

<sup>17</sup> <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

<sup>18</sup> Hadi, S., Taufiki, A., Ahmad, M. Z., & Siswanto, A. (2024). Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(1), 32-39.

- d. Pemberian Bantuan Langsung: Program bantuan sosial seperti tunjangan pendapatan, bantuan makanan, atau bantuan kesehatan dapat memberikan bantuan langsung kepada individu atau keluarga yang membutuhkan.
- e. Infrastruktur dan Akses Layanan Dasar: Membangun infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, sanitasi, dan akses ke layanan kesehatan dasar merupakan langkah penting dalam meningkatkan kualitas hidup orang-orang miskin di daerah pedesaan dan perkotaan.
- f. Kebijakan Perpajakan dan Pengeluaran: Kebijakan perpajakan yang adil dan progresif dapat membantu mengurangi kesenjangan pendapatan, sementara pengeluaran publik yang tepat sasaran untuk pembangunan sosial juga dapat membantu mengurangi kemiskinan.
- g. Perlindungan Sosial: Program jaminan sosial seperti asuransi kesehatan universal, jaminan sosial bagi anak-anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas, serta jaringan pengaman sosial lainnya, dapat membantu melindungi orang-orang miskin dari risiko kehilangan pendapatan dan akses ke layanan penting.
- h. Pemberdayaan Perempuan: Mendorong partisipasi ekonomi perempuan dan memberikan akses yang sama terhadap sumber daya dan peluang dapat membantu mengurangi kemiskinan, karena perempuan seringkali menjadi bagian yang paling rentan terhadap kemiskinan.
- i. Pencegahan Krisis: Membangun ketahanan terhadap bencana alam, perubahan iklim, dan krisis ekonomi dapat membantu mencegah peningkatan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut.
- j. Kolaborasi Antar-Sektor: Kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan program-program reduksi kemiskinan dapat memperkuat upaya-upaya tersebut dan memastikan dampak yang lebih besar.

Melalui kombinasi strategi ini, diharapkan kemampuan masyarakat untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dapat ditingkatkan, serta kesenjangan sosial dan ekonomi dapat dikurangi secara signifikan.

### **Pemberdayaan Perempuan**

Penelitian menunjukkan bahwa inklusi keuangan dapat menjadi alat penting dalam pemberdayaan perempuan. Dengan memberikan perempuan akses yang lebih besar terhadap layanan keuangan, mereka dapat mengelola keuangan keluarga, memulai atau mengembangkan bisnis mereka sendiri, dan meningkatkan akses mereka terhadap pendidikan dan layanan kesehatan<sup>19</sup>.

Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di tahun 2023 meningkat setelah melewati periode pemulihan pasca pandemi. Tindakan kebijakan dan program teknis yang dilaksanakan pada tahun tersebut untuk

---

<sup>19</sup> Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *JPPM (Jurnal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat)*, 2(2), 226-238.

memperkuat pemberdayaan perempuan Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi, mulai menunjukkan hasil yang positif. Sementara itu, upaya perlindungan anak juga mengalami peningkatan, bahkan hingga tingkat daerah<sup>20</sup>.

Pada tahun 2023, KemenPPPA berhasil meraih sejumlah penghargaan, termasuk Anugerah Keterbukaan Informasi Publik dengan penilaian sangat baik dan peringkat kedua dalam Anugerah Sistem Meritokrasi atas manajemen ASN yang sangat baik. Selain itu, layanan SIMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perempuan dan Anak) yang diselenggarakan oleh KemenPPPA menjadi salah satu dari 11 layanan publik terbaik di Indonesia.

Menyambut tahun 2024, KemenPPPA berkomitmen untuk terus meningkatkan upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bintang Puspayoga, menyampaikan dalam sebuah pertemuan media di Jakarta pada Jumat, 5 Januari, bahwa fokus akan diberikan pada penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas layanan publik yang diselenggarakan oleh KemenPPPA. Hal ini terutama terkait dengan lima arahan prioritas Presiden, dengan mengutamakan sinergi dan kolaborasi lintas sektor dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha, dan media.

"Pada tahun 2024, kami akan berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dan terus bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik bagi perempuan dan anak-anak," ujar Menteri PPPA, Bintang Puspayoga.

Perempuan yang berdaya akan menjadi fondasi yang kuat dalam pembangunan bangsa. Peningkatan kualitas hidup perempuan dari tahun ke tahun telah menunjukkan kemajuan, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Gender. Keterwakilan perempuan dalam berbagai sektor juga telah berkontribusi pada terciptanya kesetaraan gender yang semakin merata di Indonesia.

"Perempuan semakin berdaya, memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi keluarga, menduduki posisi strategis di tempat kerja, dan terlibat dalam proses politik pembangunan, yang tercermin dari peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender. Semakin banyak perempuan yang menjadi pemimpin baik di tingkat desa, sebagai kepala desa atau kepala daerah, maupun di lembaga legislatif. Tujuan kami di tahun 2024 adalah meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan," ungkap Deputy Bidang Kesetaraan Gender KemenPPPA, Lenny N Rosalin.

Di bidang pemenuhan hak anak, terjadi penurunan angka perkawinan anak, namun angka balita yang tidak mendapatkan pengasuhan yang layak masih cukup tinggi. KemenPPPA pada tahun 2024 akan memprioritaskan upaya pencegahan perkawinan anak dan penguatan pengasuhan berbasis hak anak bagi keluarga, terutama calon pasangan yang akan menikah, dengan mengoptimalkan peran Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).

"Fokus kami adalah memastikan pemenuhan hak anak, terutama dalam hal pengasuhan, dengan memperkuat pemahaman masyarakat dan keluarga tentang pengasuhan anak yang layak melalui optimalisasi PUSPAGA. Ada dua kluster dalam Indeks Pemenuhan

---

<sup>20</sup> Arisanti, W. Y., Sucipto, B., & Suryaman, W. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dp3Ap2Kb Kota Cimahi Jawa Barat. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 191-199.

## **Currency:**

### **Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

[Volume 02, Nomor 02](#), April 2024

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

Hak Anak yang akan menjadi fokus perjuangan kami di masa mendatang, yaitu kluster pendidikan dan kesehatan. Kami akan terus berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait dan pemerintah daerah karena pemenuhan hak anak, terutama dalam bidang kesehatan dan pendidikan, merupakan tanggung jawab bersama," jelas Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Pribudiarta N Sitepu.

KemenPPPA akan terus mendorong inovasi dan penguatan layanan demi melindungi perempuan dan anak-anak, dengan meningkatkan cakupan dan kualitas layanan bagi korban kekerasan. Pada tahun 2023, KemenPPPA telah berhasil mendirikan Rumah Aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan, memperkuat Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA di daerah, dan mengintegrasikan layanan pengaduan Call Center SAPA 129 di 34 provinsi.

#### **Resiliensi Terhadap Krisis**

Negara-negara yang memiliki inklusi keuangan yang kuat juga cenderung lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Individu dan rumah tangga yang memiliki akses ke layanan keuangan yang memadai dapat lebih siap menghadapi kejadian tak terduga, seperti kehilangan pekerjaan atau bencana alam, dan lebih mudah pulih dari dampaknya<sup>21</sup>.

Penilaian ini terkait dengan pencapaian Indonesia dalam mengatasi dampak ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan menghadapi tantangan global seperti stagflasi, serta krisis pangan dan energi. Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF), menyebutkan bahwa Indonesia merupakan cahaya harapan di tengah kondisi ekonomi global yang suram.

Pertama, pertumbuhan ekonomi Indonesia telah pulih setelah mengalami resesi akibat pandemi, dengan tren pertumbuhan yang meningkat di tahun 2022. Pada triwulan III-2022, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,72 persen secara tahunan, mencatat pertumbuhan tertinggi dalam satu dekade terakhir. Hal ini menunjukkan terjadinya akselerasi ekonomi yang signifikan.

Kedua, Indonesia berhasil mencatatkan surplus neraca perdagangan sepanjang tahun 2022, dengan total surplus sebesar 54,4 miliar dolar AS. Selain itu, realisasi investasi di Indonesia juga mengalami peningkatan, dengan modal sebesar Rp 1.207,2 triliun masuk ke dalam negeri, baik dari dalam maupun luar negeri. Tren ini menunjukkan peningkatan kepercayaan investor terhadap Indonesia.

Struktur ekonomi Indonesia juga menunjukkan penguatan investasi, dengan pertumbuhan komponen pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTB) dalam struktur produk domestik bruto (PDB) mencapai 4,96 persen pada triwulan III-2022, meningkat dari dua triwulan sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi yang kuat pada tahun 2022 mengonfirmasi bahwa Indonesia jauh dari resesi. Menurut laporan Bloomberg pertengahan tahun 2022, Indonesia berada di urutan ke-14 dari 15 negara Asia yang berpotensi mengalami resesi, dengan probabilitas

---

<sup>21</sup> Aula, S., Hanoum, S., & Prihananto, P. (2022). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Resiliensi Organisasi: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 11(1), D143-D148.

resesi sebesar 3 persen. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia lebih baik daripada sebagian besar negara di kawasan Asia, kecuali India.

### **Inovasi Keuangan**

Penelitian menunjukkan bahwa peningkatan inklusi keuangan juga dapat mendorong inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Melalui teknologi finansial (fintech) dan model bisnis baru, layanan keuangan dapat dijangkau oleh sejumlah besar individu yang sebelumnya tidak terlayani, sehingga membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan<sup>22</sup>.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan bukti kuat tentang pentingnya peningkatan akses keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemberdayaan perempuan, dan membangun ketahanan terhadap krisis ekonomi. Temuan ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi lainnya untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan inklusi keuangan di tingkat nasional dan global.

### **Kesimpulan**

Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa peningkatan akses keuangan memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Temuan menunjukkan bahwa negara-negara atau wilayah yang berhasil meningkatkan inklusi keuangan cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta mampu mengurangi kemiskinan dan memberdayakan perempuan secara signifikan.

Selain itu, peningkatan akses keuangan juga meningkatkan ketahanan terhadap krisis ekonomi, memungkinkan individu dan rumah tangga untuk lebih siap menghadapi tantangan ekonomi yang tak terduga. Ini memberikan perlindungan finansial yang lebih baik dan memfasilitasi pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

Selanjutnya, inklusi keuangan juga menjadi katalisator inovasi dalam produk dan layanan keuangan. Melalui teknologi finansial dan model bisnis baru, layanan keuangan dapat dijangkau oleh sejumlah besar individu yang sebelumnya tidak terlayani, membuka pintu bagi lebih banyak orang untuk mengakses layanan keuangan.

Dengan demikian, rekomendasi kebijakan yang diturunkan dari penelitian ini menekankan pentingnya upaya terus-menerus untuk memperluas akses keuangan bagi semua lapisan masyarakat. Langkah-langkah konkret harus diambil oleh pemerintah, lembaga keuangan, dan organisasi lainnya untuk memastikan bahwa layanan keuangan yang bermanfaat dan terjangkau tersedia untuk semua, sehingga menciptakan landasan yang lebih kokoh untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata.

### **Daftar Pustaka**

---

<sup>22</sup> Khalifaturofi'ah, S. O. (2019). Inovasi Keuangan Perbankan Di Indonesia.

## Currency:

## Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah

[Volume 02, Nomor 02](#), April 2024

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Aqida, M. S., & Fitria, S. (2019). *Pengaruh akses keuangan terhadap pertumbuhan UMKM dengan moderasi literasi keuangan di kota Semarang* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Arisanti, W. Y., Sucipto, B., & Suryaman, W. (2023). Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Dp3Ap2Kb Kota Cimahi Jawa Barat. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(2), 191-199.
- Aula, S., Hanoum, S., & Prihananto, P. (2022). Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Meningkatkan Resiliensi Organisasi: Sebuah Studi Literatur. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 11(1), D143-D148.
- Faizah, N. H., & Suib, M. S. (2019). UKM Dalam Persaingan Di Era GLocalisasi Ekonomi. *Upajiw Dewantara*, 3(2), 127-135.
- Hadi, S., Taufiki, A., Ahmad, M. Z., & Siswanto, A. (2024). Analisis Tingkat Kemiskinan Tahun 2023 Di Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Jember. *Journal Of Indonesian Social Society (JISS)*, 2(1), 32-39.
- Hadna, N. M. S., Santosa, P. I., & Winarno, W. W. (2016). Studi literatur tentang perbandingan metode untuk proses analisis sentimen di Twitter. *Semin. Nas. Teknol. Inf. dan Komun*, 2016, 57-64.
- Hartati, Y. S. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 12(1), 79-92.
- Hello, M. H., & Manilet, A. (2023). INDEKS INKLUSI KEUANGAN INDONESIA (ANALISIS KONTRIBUSI SEKTOR USAHA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO). *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 4(2), 550-569.
- Hodijah, S., & Angelina, G. P. (2021). Analisis pengaruh ekspor dan impor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 10(01), 53-62.
- <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>
- Khalifaturofi'ah, S. O. (2019). Inovasi Keuangan Perbankan Di Indonesia.
- Martono, N. (2010). *Metode penelitian kuantitatif: Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder (sampel halaman gratis)*. RajaGrafindo Persada.
- Pamungkas, A. H., Sunarti, V., & Wahyudi, W. A. (2018). Peran PKBM dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan hidup masyarakat sesuai target SDGs. *SPEKTRUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah (PLS)*, 6(3), 303-309.
- Parsaulian, B. (2022). Peningkatan Akses Keuangan Masyarakat Melalui Sistem Keuangan Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(1), 69-83.
- Pellu, A. (2023). MODEL INKLUSI KEUANGAN PADA PEDAGANG PASAR TRADISIONAL BERBASIS PEDESAAN. *Investi: Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, 4(2), 514-528.
- Putri, L. I. (2017). Reduksi Kemiskinan Melalui Sosiopreneurship. *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 6(1), 48-68.
- Saptia, Y., Nugroho, A. E., & Soekarni, M. (2021). *Perluasan akses keuangan UMKM berbasis tekfin di Indonesia dan pengalaman negara tetangga*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.



**Currency:**  
**Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah**

[Volume 02, Nomor 02](#), April 2024

ISSN: 2963-9387//e-ISSN: 2963-7465

---

- Saugi, W., & Sumarno, S. (2015). Pemberdayaan perempuan melalui pelatihan pengolahan bahan pangan lokal. *JPPM (Jurnal pendidikan dan pemberdayaan masyarakat)*, 2(2), 226-238.
- Septiani, B. A., Chandraderia, D., Arini, T. A., & Pratomo, Y. (2020). Peran usaha Maju Sukses Bersama (MSB) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 25(2), 169-185.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (1995). Metode penelitian survei.
- Yunus, M. (2012). Perbandingan metode-metode edge detection untuk proses segmentasi citra digital. *Jurnal Teknologi Informasi: Teori, Konsep, dan Implementasi*, 3(2), 146-160.